

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Kepustakaan

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Anthony dan Govindarajan Astriati (2017) konsep teori *agency* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (yang dalam hal ini publik) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Asumsi teori *agency* terjadi di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dimana kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat dengan harapan *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama dengan *agent* sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak *principal* merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak

agent bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak *principal* Purnamawati (2013).

2. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al, (2009) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memberikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Suatu pemerintah yang menerapkan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam

lingkungan pemerintah. Dengan standar akuntansi pemerintah diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan. Penerapan standar akuntansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Wijaya (2018: 4) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Nurlan Darise (2018:39) mengemukakan bahwa: Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Indra Bastian (2010: 138) tujuan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) adalah: Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit Sinaga (2010: 8).

Dalam penyajian Informasi Akuntansi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan

dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun tujuh indikator yang digunakan dalam akuntansi dan standar pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

a. Berbasis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan

basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau

kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenueprinciple*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Perioditas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada

saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidak pastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Dengan kata lain, unsur pemahaman terhadap SAP berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Motivasi Kerja

Menurut Malayu (2012: 191) motivasi kerja adalah suatu perangsang keinginan daya gerak kemauan bekerja seseorang, setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan Asa'ad (2010: 140) motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Wahjosumidjo (2012: 174) mendefinisikan motivasi kerja sebagai suatu proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang.

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2010 : 10) dengan danya motivasi kerja maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang

tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Motivasi kerja mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan menurut Edy Sutrisno (2014: 110).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan yang dapat membangkitkan kemauan kerja karyawan untuk memulai melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Hasibuan (2012: 194) pada dasarnya ada 6 (delapan) indikator yang mempengaruhi tingkat motivasi kerja pegawai diantaranya:

a. Teladan pimpinan

Teladan pimpinan berperan penting untuk membentuk kedisiplinan pegawai mengingat pimpinan sebagai teladan dan panutan oleh para bawahannya. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan para pegawai akan terbawa baik. Tetapi jika teladan pimpinan kurang baik (semisal kurang disiplin), maka para pegawai juga pasti akan kurang disiplin.

b. Balas Jasa

Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya. Jika kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.

c. Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik.

d. Waskat

Waskat (pengawas melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja pegawai. Pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasan.

e. Ketegasan

Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap pegawai yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada suatu instansi.

f. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah suatu alat yang digunakan oleh para manajer untuk berkomunikasi dengan para karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan juga dapat diartikan sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya.

4. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan

Ketaatan atau kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Dengan sikap taat dan patuh akan membentuk perilaku disiplin.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan kewajiban yang sangat penting sebab tanpa adanya ketaatan ini akan timbul akibat sebagai berikut:

- a. Sia-sia tenaga dan biaya untuk membuat peraturan tersebut.

- b. Pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan ketidaktertiban.
- c. Rasa aman berkurang.
- d. Kegiatan masyarakat terganggu.
- e. Akhirnya, pembangunan pun akan terhambat.

Ketaatan pada peraturan perundangan dapat ditinjau dari kepatuhan pada peraturan-peraturan, tanggungjawab pada perusahaan dll. Ketaataan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara Soleman (2012: 207).

Ketaatan Umami (2010: 26) merupakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang, bukan terletak pada kemarahan atau agresi yang meningkat, tetapi lebih pada bentuk hubungan mereka dengan pihak berwenang.

- a. Patuh adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa apa yang diminta, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain
- b. Bertanggungjawab adalah suatu perbuatan untuk siap menanggung segala sesuatu hal yang muncul.

5. Kualitas Laporan Keuangan

Heizer dan Render (2010: 253) berpendapat bahwa kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik dari produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu periode. Komite Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan Yuliani (2010: 19)

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan menurut Hilton (2011: 551) berpendapat bahwa tiga karakteristik informasi untuk menentukan kegunaannya dalam pengambilan keputusan yaitu, relevan, akurat dan ketepatan waktu. Relevan dan akuratnya data hanya berharga jika mereka tepat waktu yaitu, tersedia pada waktunya untuk mengambil keputusan. Kualitas laporan keuangan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut komite standar akuntansi pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuan. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemerintah No. 71

Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

a. Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik
- 2) Memiliki manfaat prediktif
- 3) Tepat waktu
- 4) Lengkap

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- 1) Penyajian jujur
- 2) Dapat diverifikasi
- 3) Netralitas

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Oleh karena itu orang bertugas untuk menyajikan laporan keuangan suatu instansi haruslah paham tentang aturan ataupun

standar pelaporan keuangan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dibuat berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Ardi Kusumah (2012) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya (2) Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya (3) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD / OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya baik; (2) Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota

Tasikmalayabaik; (3) terdapat pengaruh signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan? 2) Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan? 3) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (2) Untuk menguji Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (3) Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2013) Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). Rumusan masalah pada penelitian ini Apakah Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Susanto (2016) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung dengan rumusan masalah Apakah 1. penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?, 2. Apakah penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?, 3. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?, 4. Apakah Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris : 1. Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 2. Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 3.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 4. Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif dengan hasil Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Semakin baik tingkat penerapan SAP yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan maka akan berdampak positif pada peningkatan kualitas LKPD terutama di Provinsi Lampung, Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan efektifitas SPIP secara terus-menerus dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPD, dan Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2014) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAP dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jembrana.

Penelitian yang dilakukan oleh Baja Lodhrakenjana dan Elvira Luthan (2013) Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Komitmen

Pegawai Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pada Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen pegawai akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini masing-masing variable motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen pegawai akuntansi berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara bersama-sama dan signifikan ketiga variable ini saling mendukung dan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Fahrul Razi (2017) Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Rumusan masalah pada penelitian ini 1) Apakah pengaruh ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? pemerintah, 2) Apakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? 3) Apakah pengaruh pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan? 4) Apakah pengaruh kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 2) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 3) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 4) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

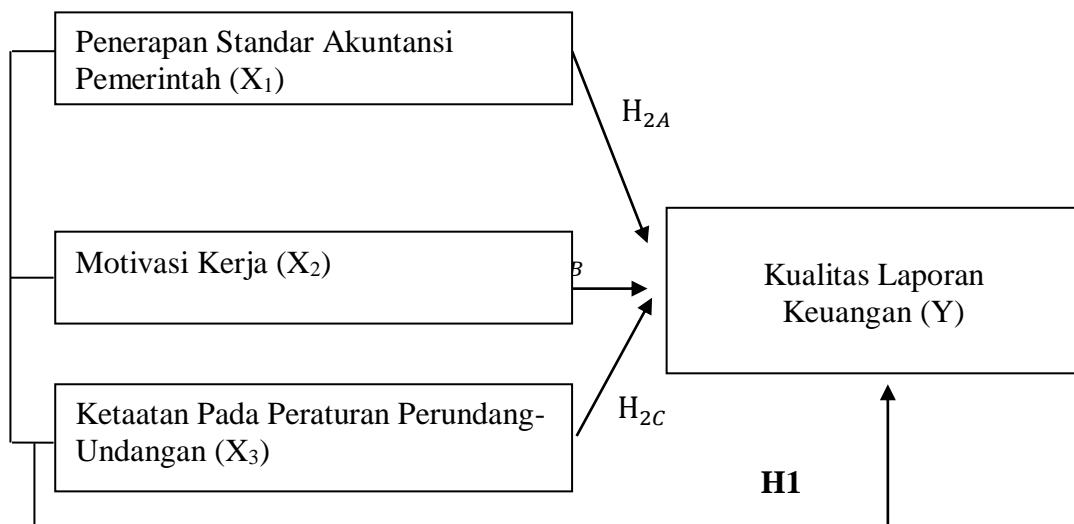
Hasil dari penelitian ini keempat variable ketaatan terhadap peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Motivasi Kerja dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan



Sumber : Penulis, 2019

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran dan penjelasan mengenai beberapa variable tersebut, maka dapat diuraikan pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pada penelitian ini :

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu yang menjadi kriteria atau standar instansi pemerintah daerah adalah standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan hasil Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, dijelaskan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bukti adanya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan juga dikemukakan oleh Nurlaila (2013) yang mengemukakan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kualitas sebuah laporan keuangan merupakan gabungan dari kualitas bagian-bagian dari laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah kualitas dari Neraca dalam laporan keuangan. Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari peneliti sebelumnya, hipotesis 1 yang diajukan adalah :

H_{2A} : Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .

2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Motivasi kerja merupakan suatu kehendak atau keinginan yang muncul dalam diri seseorang yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja secara optimal guna mencapai tujuan. Motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bekerja individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan. Motivasi kerja adalah suatu kondisi yang membuat pegawai mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas. Motivasi kerja akan dapat mensuplai energi untuk bekerja atau mengarahkan aktivitas selama bekerja, dan menyebabkan seorang pegawai mengetahui adanya tujuan yang relevan antara tujuan organisasi dan tujuan pribadinya.

Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari peneliti sebelumnya, hipotesis 2 yang diajukan adalah :

H_{2B} : Motivasi kerja yang diberikan kepada karyawan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

3. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Ketaatan atau kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Dengan sikap taat dan patuh akan membentuk perilaku disiplin.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan kewajiban yang sangat penting sebab tanpa adanya ketaatan ini akan timbul akibat sebagai berikut.

- a. Sia-sia tenaga dan biaya untuk membuat peraturan tersebut.
- b. Pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan ketidaktertiban.
- c. Rasa aman berkurang.
- d. Kegiatan masyarakat terganggu.
- e. Akhirnya, pembangunanpun akan terhambat.

Dengan adanya ketaatan pada peraturan perundangan, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan tepat dan sesuai dengan peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Ketaatan pada peraturan perundangan dapat ditinjau dari kepatuhan pada peraturan-peraturan, tanggungjawab pada perusahaan dll.

Ketaatan Umami (2010: 26) merupakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang, bukn terletak pada kemarahan atau agresi yang meningkat, tetapi lebih pada bentuk hubungan mereka dengan pihak berwenang.

- a. Patuh adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa apa yang diminta, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.
- b. Bertanggungjawab adalah suatu perbuatan untuk siap menanggung segala sesuatu hal yang muncul.

H_{2c} : Terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Wiratna (2014: 11) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Merupakan penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan yang lain atau variabel satu dengan standar, atau berupa hubungan sebab – akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh variabel pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Muara Enim.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian dapat dilihat pada

Tabel III.1

Tabel III. 1

Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim

No	Nama OPD	Alamat
1.	Dinas Perikanan	Jl. Mayjen Tjik Agoes Kiemas, Lintas Kepur Muara Lawai, Muara Enim. Telp (0734) 7420099
2.	Dinas Perkebunan	Jl. Mayjen Tjik Agoes Kiemas, Lintas Kepur Muara Lawai, Muara Enim. Telp (0734) 421019
3.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Jl. Mayjen Tjik Agoes Kiemas, Lintas Kepur Muara Lawai, Muara Enim. Telp (0734) 421040
4.	Dinas Perdagangan	Jl. Mayjen Tjik Agoes Kiemas, Lintas Kepur Muara Lawai, Muara Enim.
5.	Dinas Pendidikan	Jl. Ahmad Yani. Kelurahan Pasar I Muara Enim. Telp (0734) 421042
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jl. Mayjen Tjik Agoes Kiemas, Lintas Kepur Muara Lawai, Muara Enim. Telp (0734) 7420070
7.	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 23 Muara Enim Telp (0734) 421018
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jl. Merdeka Muara Enim
9.	Dinas Sosial	Jl. Ahmad Yani. Kelurahan Pasar I Muara Enim
10.	Dinas Kesehatan	Jl. Dr. AK Gani No. 90 Tungkal Muara Enim
11.	Dinas Perkebunan	Jl. Mayjen Tjik Agoes Kiemas, Lintas Kepur Muara Lawai, Muara Enim Telp. (0734) 7420106
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Mayjen Tjik Agoes Kiemas, Lintas Kepur Muara Lawai, Muara Enim
13.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jl. Jend. Ahmad Yani. Kelurahan Pasar I Muara Enim
14.	Disperindag	Jl. Jend. Ahmad Yani. Kelurahan Pasar I Muara Enim
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Merdeka Muara Enim

Sumber : Penulis, 2019

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)	Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan	a. Basis akuntansi b. Nilai historis (<i>historical cost</i>) c. Realisasi (<i>realization</i>) d. Substansi mengungguli bentuk formal (<i>substance over form</i>) e. Periodisitas (<i>Periodicity</i>) f. Pengungkapan Lengkap (<i>full disclosure</i>) g. Penyajian Wajar (<i>fair presentation</i>)	Skala Ordinal
Motivasi Kerja (X_2)	Motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bekerja individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan	a. Teladan pemimpin b. Balas jasa c. Keadilan d. Waskat e. Ketegasan f. Keadilan	Skala Ordinal
Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan (X_3)	Ketaatan pada Perundangan merupakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang, bukan terletak pada kemarahan atau agresi yang meningkat, tetapi lebih pada bentuk hubungan merakan dengan pihak berwenang.	a. Patuh b. Bertanggungjawab	Skala Ordinal
Kualitas Laporan Keuangan (Y_1)	Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.	a. Relevan b. Andal c. Dapat dibandingkan d. Dapat dipahami	Skala Ordinal

Sumber : Penulis, 2019

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disperindag, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Responden pada setiap organisasi perangkat daerah dipilih sebanyak 3 (tiga) orang dengan jabatan Bendahara, Kasubag Keuangan dan Manajemen. Populasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini.

2. Sampel

Menurut Wiratna (2014: 65) bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, penelitian tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Pengambilan sampel yang digunakan adalah 45 sampel. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 218) *Proportionate Stratified Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = *Margin of error* (kesalahan maksimum yang bias ditoleransi sebesar 10%)

Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\
 &= \frac{17}{1 + (17 \times 0,1^2)} \\
 &= \frac{17}{1 + 0,17} \\
 &= \frac{17}{1,17} = 14,52
 \end{aligned}$$

Dibulatkan menjadi 15

E. Data yang Diperlukan

Menurut Wiratna (2014: 73) dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara penelitian dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lainnya.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Tes

Tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti. Tes dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar maupun pencapaian atau prestasi misalnya tes IQ, minat, bakat khusus, dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar mendapatkan data yang valid dan detail.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek.

4. Kuesioner atau Angket (*Questioner*)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari para responden.

5. Survei (*survey*)

Survei lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan. Oleh karena itu survei tidak digunakan untuk menguji suatu hipotesis.

6. Analisis Dokumen

Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kuesioner atau hak anket dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disebar kepada responden secara langsung pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.

G. Analisis Data Dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Wiratna (2015: 111) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode analisis data secara sederhana dapat disebut hasil kategori (pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka

tetapi diangkat misal, jenis kelamin, status dan lain sebagainya.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode analisis yang diukur dalam berupa angka dalam arti sebenarnya.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi (tabelaris) yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

2. Teknik Analisis

Menurut Anwar (2016: 115) teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yang diukur dengan skala ordinal. skala ordinal merupakan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data, sekaligus mengandung unsur pemeringkatan (*ranking*), derajat (*degree*) atau tingkatan (*level*) melalui penilaian tertentu. Penilaian yang dilakukan dapat mengandung unsur objektivitas maupun subjektivitas atau kombinasi keduanya. Skala ordinal sangat berguna karena mempunyai tingkatan dalam mengukur tingkat loyalitas,

hubungan, kepuasan, motivasi, kualitas produk atau jasa, keberhasilan, nilai tambah dan lainnya. Pada skala ordinal jawaban dapat berupa kata-kata antara lain :

Sangat Setuju	= SS
Setuju	= S
Ragu-ragu	= RR
Tidak Setuju	= TS
Sangat Tidak Setuju	= STS

Hasil kuesioner yang disebar kepada responden kemudian direkap dalam bentuk tabulasi, dan dihitung persentase tiap jawaban dari instrumen kuesioner lalu dijelaskan secara kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science (SPSS)*. Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode *Ordinal Least Square (OLS)* maka terlebih dahulu harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan asumsi klasik.

a. Uji Validitas

Dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukur yang telah disusun telah memiliki validitas atau tidak. Hasilnya akan ditunjukkan suatu indeks sejauh mana alat ukur benar – benar mengukur apa yang ingin diukur. Menurut Wiratna

(2014: 106-108) ada dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah butir dikatakan valid, yaitu :

1) Pengujian validitas konstruk

Menyusun pertanyaan yang akan dilakukan dalam penelitian sesuai dengan variabel yang ada dalam penelitian kemudian konsultasi.

2) Pengujian validitas isi

Instrumen yang harus memiliki validitas isi menunjukkan pada sejauh mana instrumen tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki.

3) Pengujian validitas eksternal

Validitas eksternal menekankan pada aspek keinginan instrument yang digunakan sesuai dengan kondisi empiris dilapangan.

Menurut Sugiyono (2016: 317) nilai r untuk $N=30$ dengan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Jadi apabila r lebih besar dari 0,361 maka dinyatakan valid dan sebaliknya apabila r lebih kecil dari 0,361 dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiyono (2016: 96) dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara

eksternal, pengujian dilakukan dengan *test-retest (stability)*, *equivalent* dan gabungan keduanya. Secara internal pengujian dilakukan dengan menganalisis konstistensi butir – butir yang ada pada instrumen dengan teknik–teknik tertentu. Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk–konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu kuesioner.

Teknik–teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisiensi *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *Software SPSS*. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,6. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) *Cronbach's Alpha* > 0,6 *Cronbach's Alpha* acceptable (construct reliable).
- 2) *Cronbach's Alpha* < 0,6 *Cronbach's Alpha* acceptable (construct unreliable).

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* dengan semua variabel menunjukkan lebih besar dari 0,6. Dengan demikian jawaban–jawaban responden

dari variabel–variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel–variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari Romie (2017: 116)

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak Romie (2017: 117). Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan grafik *normal p-p plot of regression standardized residual* yaitu:

- a) Bila titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residu tersebut normal.
- b) Bila titik-titik menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti garis diagonal maka nilai residu tersebut tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah ditentukannya ada korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen pada modal regresi Romie (2017: 122). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara

variabel bebas. Dilihat nilai *tolerance* dan *inflation foctotor* (VIF). Diketahui nilai *tolerance* $> 0,1$ dari nilai VIF maka kesimpulan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan yang mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residu pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain Romie (2017: 125). Model regresi yang baik adalah tak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yaitu dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* dengan *standardized residual*, ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* dengan *standardized residual* yang mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y asli).

Pengambilan keputusan yaitu:

- a) Bila terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas
- b) Bila tak ada pola yang dijelaskan seperti seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka

0 pada sumbu Y maka tak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terdapat korelasi anantara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1) Romie (2017: 131). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Metode pengujian dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- a) $DU < DW < 4-DU$ maka diterima yang berarti tak terjadi autokorelasi
- b) $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka ditolak yang berarti terjadi autokorelasi
- c) $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$ berarti tak ada kesimpulan yang pasti.

d. Uji Hipotesis

1) Regresi Linier Berganda

Linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen Romie (2017: 154). Dalam analisis linier

berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi yang residual berdistribusi normal, tak ada multikolinearitas, tak ada heteroskedastisitas, dan tak ada autokorelasi.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X₁ = Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

X₂ = Motivasi Kerja

X₃ = Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan

α = Konstanta

β = Beta

e = Error

2) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) sering juga disebut dengan koefisien determinasi majemuk (*multiple coefficient of determination*) yang hampir sama dengan koefisien r^2 . R^2 juga hampir serupa dengan r , tetapi keduanya berbeda dalam fungsi (kecuali regresi linier sederhana). R^2 menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terkait (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel $X = 1, 2, 3, 4, \dots, k$) secara bersama-sama.

Persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas Anwar (2011).

3) Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersamaan merupakan pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y). langkah-langkah dalam uji hipotesis secara bersama yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

H_{01} : Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{a1} : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{02A} : Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{a2A} : Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{02b} :Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{a2b} : Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

b) Menentukan Tarif Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, tariff nyata (α) berarti nilai F_{tabel} tarif nyata dari F_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c) Kesimpulan

Jika $sig > 0,05$ maka H_o diterima. Jika $sig < 0,05$ maka H_o ditolak. F hitung $< F$ tabel maka H_o diterima. F hitung $> F$ tabel maka H_o ditolak.

4) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1) secara individual mempengaruhi variabel (Y). Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

H_{01} : Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{a1} : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{02A} : Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{a2A} : Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{02b} : Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H_{a2b} : Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

b) Menentukan Tarif Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, tariff nyata (α) berarti nilai t_{tabel} tarif nyata dari t_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c) Kesimpulan

Jika $\text{sig} > 0,05$ maka H_o diterima. Jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_o ditolak. $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima. $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_o ditolak Wiratna (2015: 161).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 9.140,50 KM² dan terbagi menjadi 22 Kecamatan yang terdiri dari 305 desa dan 16 kelurahan. Pada masa pendudukan Hindia Belanda, saat struktur pemerintahan di daerah masih berbentuk Marga, di sepanjang aliran tiga sungai itu terdapat beberapa pemerintahan marga. Dijalur sungai Enim misalnya meliputi Marga Tamblang Ujan Mas sampai Marga Sungai Rotan. Sedangkan di sepanjang Sungai Lematang Meliputi Marga Semendo sampai Marga Tamblang Patang Puluh Bubung. Semuanya bergabung dalam wilayah administratif *Onder Afdeling* Lematang Ilir. Kabupaten Muara Enim berada dan tunduk pada *Afdeling Palembang Sche Boven Landen* dengan dipimpin seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat.

Asisten Residen selain membawahi wilayah Lematang Ilir juga membawahi *Onder Afdeling* Lematang Ulu dengan ibu kota Lahat, *Onder Afdeling* Tebing Tinggi dengan ibu kota Tebing Tinggi dan *Onder Afdeling* Pasemah dengan ibu kota Pagaram. Pada masa pendudukan

Jepang wilayah administratif *Onder Afdeling* berganti nama menjadi Kewedanaan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Saat itu wilayah-wilayah marga dibagi dalam dua wilayah kewedanaan. Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dan Kewedanaan Lematang Ilir. Kewedanaan Lematang Ogan Tengah meliputi dengan wilayah meliputi Marga Rambang Niru, Marga Empat Petulai Curup, Marga Empat Petulai Dangku, Marga Sungai Rotan (yang sebelumnya marga-marga ini masuk wilayah Lematang Ilir), Marga Rambang Kapak Tengah, Marga Lubai Suku Satu, Marga Lubai Suku Dua (sebelumnya masuk wilayah Ogan Ulu), Marga Alai, Marga Lembak, Marga Kartamulya, Marga Gelumbang, Marga Tambangan Kelekar (sebelumnya masuk wilayah Igan Ilir) serta Marga Abab dan Marga Penukal (yang sebelumnya masuk wilayah Sekayu).

Sementara itu Kewedanaan Lematang Ilir meliputi Marga Semendo Darat, Marga Panang, Sangang Puluh, Marga Panang Selawi, Marga Panang Ulung Puluh, Marga Lawang Kidul, Marga Tamblang Karang Raja, Marga Tamblang Patang Puluh Bubung dan Marga Tamblang Ujan Mas. Setiap marga di bawah kepala pemerintahan bernama Pasirah. Pada masa kemerdekaan, berdasarkan sidang Dewan Keresidenan Palembang Tanggal 20 November 1946, Wilayah Kemerdekaan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah di gabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah di singkat LIOT dengan ibu kota Muara Enim.

Berdasarkan SK Bupati Kdh II LIOT Nomor 47/Deshuk/1972 Tanggal 14 Juni 1972 di tetapkan Tanggal 20 November 1946 sebagai Hari Jadi Kabupaten Muara Enim lalu berdasarkan SK Bupati Tingkat II Muara Enim Nomor 2642/B/1980 Tanggal 06 Maret 1980, terhitung 01 April 1980 nama Kabupaten LIOT di kembalikan pada nama semula yaitu Kabupaten Tingkat II Muara Enim, hal mana telah tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia-LN RI, Tahun 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Juncto UU Nomor 28 Tahun 1959 (LN RI Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan LN RI Nomor 1821) Tentang Penetapan UU Darurat di atas sebagai Undang-Undang (UU).

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1959 tersebut pula Muara Enim Ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dengan batas-batas sebagaimana di maksud dalam Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 20 Maret 1950 Nomo Gb/100/1950. Lalu berdasarkan pasal 121 UU Nomor 22 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 60 Tentang Pemerintahan Daerah, sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim berbah menjadi Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Muara Enim memiliki 22 kecamatan, yaitu; Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Ulu Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan, Rambang Dangku, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab, Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Kelekar.

Jarak terjauh dari ibu kota Kabupaten Muara Enim ke ibu kota kecamatan adalah Kecamatan Muara Belida yaitu sejauh 156 KM, Kecamatan Kelekar sejauh 126 KM, Kecamatan Rambang sejauh 122 KM, Kecamatan Gelumbang sejauh 121 KM. Untuk kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Ujan Mas dengan jarak hanya 17 KM

2. Visi Dan Misi Kabupaten Muara Enim

- a. Visi Kabupaten Muara Enim ialah: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis, dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang"**
- b. Penjelasan dari pernyataan visi tersebut yaitu: Masyarakat Kabupaten Muara Enim adalah semua penduduk yang bermukim dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Muara Enim, yang diharapkan:

1) Sehat

Sehat baik jasmani maupun rohani yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, baik kebutuhan fisik maupun rohani, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta terciptanya lingkungan yang sehat.

2) Mandiri

Bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, berdaya saing, bersinergi dengan lembaga regional, internasional dan daerah lainnya serta didukung oleh tersedianya sumberdaya manusia berkualitas, tersedianya dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur dan lembaga pemerintahan yang memadai, birokrasi pemerintahan yang handal, serta kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain.

3) Agamis

Masyarakat Kabupaten Muara Enim ditandai oleh keyakinan masyarakat akan agama yang dianutnya dan melaksanakan ibadah dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kehidupan beragama yang saling berdampingan secara rukun dan saling menghormati, serta senantiasa melaksanakan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi moral dan etika keagamaan.

4) Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sejahtera ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar penduduk meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri ke arah yang lebih baik.

a. Misi Kabupaten Muara Enim

Pernyataan misi Kabupaten Muara Enim penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapai visi:

1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Diarahkan kepada percepatan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga sektor utamanya, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Selain itu juga sektor lainnya seperti penguasaan IPTEK, pemukiman dan perumahan,

pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, kependudukan dan keluarga berencana, agama, kesenian, kebudayaan dan pariwisata, serta bidang anak dan kesetaraan gender, pemuda dan olahraga.

2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, pelayanan publik, perilaku dan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, produktif, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Pengembangan Informasi Teknologi daerah, Menciptakan sistem dan kelembagaan pemerintahan yang mendukung terwujudnya transparansi, *rule of law*, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

3) Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Diarahkan kepada upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kepentingan masyarakat luas. Penyediaan sarana prasarana/infrastruktur pendukung perekonomian yang memadai. Peningkatan peran sektor unggulan dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat dan penerimaan daerah. Penyediaan lapangan kerja dan

lapangan usaha bagi masyarakat, Memantapkan kerjasama pemerintah - swasta, kerjasama dengan lembaga perekonomian, antar wilayah dan antar negara yang saling menguntungkan.

4) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Diarahkan melalui pengembangan program pembangunan berbasis masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemantapan otonomi desa, peningkatan akses perkreditan murah dan mudah kepada UMKMK, dan pengembangan lembaga sosial ekonomi di pedesaan.

5) Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup

Diarahkan pada pelaksanaan konsep pembangunan hijau. Peningkatan ruang terbuka hijau, Pengendalian pencemaran air, lahan, dan udara. Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara konsisten. Pengelolaan persampahan daerah. Mengupayakan terciptanya lahan pertanian lestari.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas Variabel Penelitian

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment* yang dilakukan terhadap 45 responden

yang menggunakan sample penelitian. Adapun hasil uji validitas instrument variable penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1), motivasi kerja (X_2), ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) dan kualitas laporan keuangan (Y) pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)

Item	r_{hitung}	r_{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
1	0.476	0,288	Valid
2	0.325	0,288	Valid
3	0.484	0,288	Valid
4	0.648	0,288	Valid
5	0.437	0,288	Valid
6	0.335	0,288	Valid
7	0.299	0,288	Valid
8	0.320	0,288	Valid
9	0.329	0,288	Valid
10	0.356	0,288	Valid
11	0.337	0,288	Valid
12	0.328	0,288	Valid
13	0.446	0,288	Valid
14	0.426	0,288	Valid

Sumber: Diolah dari data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} untuk 14 item di atas nilai r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan validitas kuesioner variabel

penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) menggunakan program SPSS versi 23 dapat dilihat pada Lampiran Skripsi ini.

Tabel IV.2

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja (X_2)

Item	r_{hitung}	r_{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
1	0.564	0,288	Valid
2	0.734	0,288	Valid
3	0.555	0,288	Valid
4	0.404	0,288	Valid
5	0.312	0,288	Valid
6	0.539	0,288	Valid
7	0.300	0,288	Valid

Sumber: Diolah dari data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} untuk 7 item di atas nilai r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel motivasi kerja (X_2) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan validitas kuesioner variabel motivasi kerja (X_2) menggunakan program SPSS versi 23 dapat dilihat pada Lampiran Skripsi ini.

Tabel IV.3

Hasil Uji Validitas Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (X_3)

Item	r_{hitung}	r_{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
1	0.453	0,288	Valid
2	0.452	0,288	Valid
3	0.361	0,288	Valid
4	0.553	0,288	Valid

Sumber: Diolah dari data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} semua item pernyataan dari variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) lebih besar dari pada nilai r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, 4 item pernyataan variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) dinyatakan *valid* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan validitas kuesioner variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) menggunakan program SPSS versi 23 dapat dilihat pada Lampiran Skripsi ini.

Tabel IV.4

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Item	r_{hitung}	r_{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
1	0.333	0,288	Valid
2	0.412	0,288	Valid
3	0.350	0,288	Valid
4	0.534	0,288	Valid
5	0.554	0,288	Valid
6	0.478	0,288	Valid
7	0.320	0,288	Valid
8	0.406	0,288	Valid
9	0.487	0,288	Valid
10	0.534	0,288	Valid

Sumber: Diolah dari data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel IV.4 dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} untuk 10 item di atas nilai r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel kualitas laporan keuangan (Y) dinyatakan *valid* dan

dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan validitas kuesioner variabel kualitas laporan keuangan (Y) menggunakan program SPSS versi 23 dapat dilihat pada Lampiran Skripsi ini.

b. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Hasil pengujian reliabilitas variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.5.

Tabel IV.5

Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	0.775	0,60	Reliabel
Motivasi Kerja (X ₂)	0.746		Reliabel
Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan(X ₃)	0.668		Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.754		Reliabel

Sumber: Diolah dari data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel IV.5 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk variabel seluruh variabel penelitian lebih besar dari pada nilai standar reliabilitas, sehingga semua pernyataan untuk setiap variabel tersebut dinyatakan *reliabel* dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

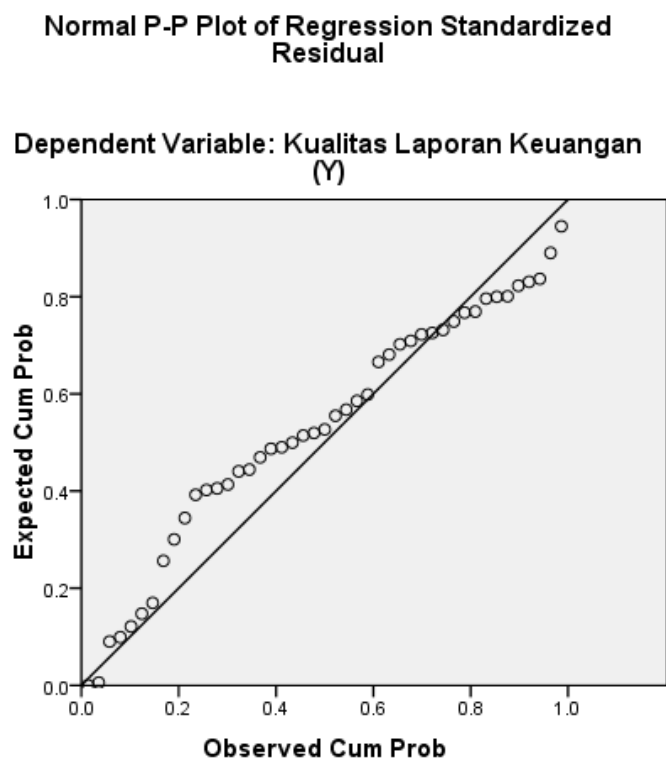
4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bisa dilihat dari grafik normal *P-Plot* dapat dilihat pada gambar IV.1.

Gambar IV.1

Grafik Normal P-Plot



Berdasarkan analisis menggunakan SPSS terlihat *normal probability plot* bahwa data masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian sudah berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan dengan menyebarnya data disekitar garis

diagonal dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics			
		T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.839	0.000		
	Penerapan SAP (X_1)	3.176	0.004	0.895	1.117
	Motivasi Kerja (X_2)	3.679	0.000	0.887	1.128
	Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (X_3)	2.924	0.012	0.972	1.028

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Pengolahan data primer, 2019

Berdasarkan Tabel IV.6 di atas dapat diketahui bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) mempunyai tolerance sebesar 0.895 dan nilai VIF 1.117, variabel motivasi kerja (X_2) mempunyai tolerance sebesar 0.887 dan nilai VIF 1.128, dan variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) mempunyai nilai tolerance sebesar 0.972 dan nilai VIF 1.028. Dengan demikian, seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF diatas 1 dan dibawah

10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas variabel bebas terhadap variabel terikat.

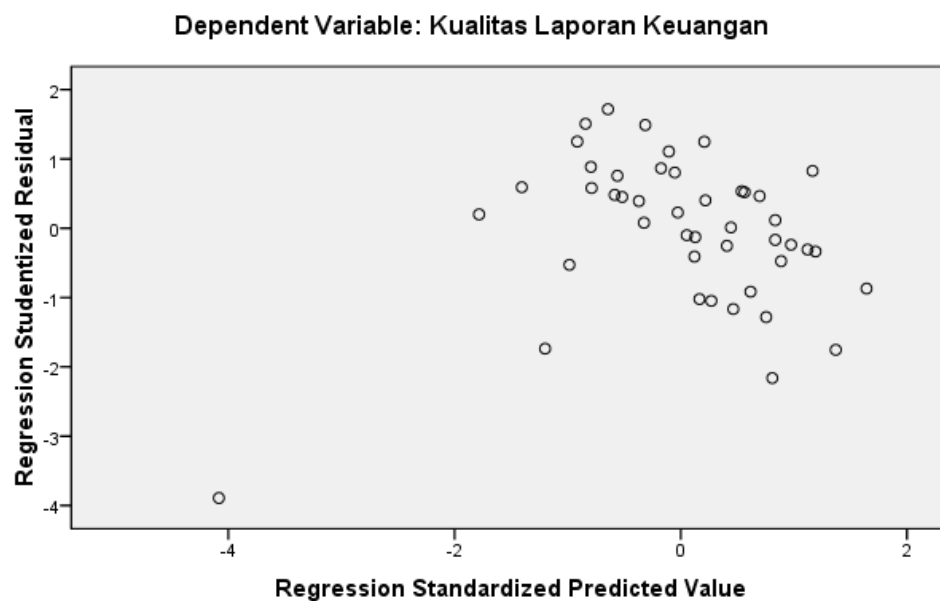
c. Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *SPSSver 23.0 for windows*, dapat dilihat pada gambar IV.2

Gambar IV.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Berdasarkan Gambar IV.2 dapat diketahui bahwa sebaran data tidak bertumpuk satu bidang, melainkan berpencar dan berada di atas 0 dan di bawah 0, sehingga semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.7 berikut.

Tabel IV.7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Squares	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.590 ^a	.348	.343	2.640	1.485

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (X3), Penerapan SAP (X1), Motivasi Kerja (X2)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Pengolahan data primer, 2019

Berdasarkan *output* di atas, diketahui nilai DW sebesar 1.485. Dilihat dari tabel Durbin-Watson, angka D-W tersebut diantara -2 sampai +2, hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi.

5. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Regresi Berganda

hasil uji regresi berganda menggunakan program SPSS versi 23.0 dapat dilihat pada Tabel IV.8 sebagai berikut:

Tabel IV.8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	35.936	7.425	
Penerapan SAP (X1)	.317	.206	.227
Motivasi Kerja (X2)	.354	.211	.264
Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (X3)	.225	.243	.139

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Pengolahan data primer, 2019

Dari hasil regresi linear berganda yang diteliti padapenerapan standar akuntansi pemerintah (X_1), motivasi kerja (X_2), dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dapat digambarkan sebagai berikut : $Y = 35.936 + 0.317 X_1 + 0.354 X_2 + 0.225 X_3 + e$

- 1) Koefisien konstanta sebesar 35.936 artinya apabila penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1), motivasi kerja (X_2), dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) nilainya tetap, maka kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 35.936.

- 2) Hasil perhitungan nilai koefisien variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) sebesar 0.317, artinya apabila penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1) meningkat sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan (Y) akan bertambah sebesar 0.317.
- 3) Hasil perhitungan nilai koefisien variabel motivasi kerja (X_2) sebesar 0.354, artinya apabila motivasi kerja (X_2) meningkat sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan (Y) akan bertambah sebesar 0.354.
- 4) Hasil perhitungan nilai koefisien variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) sebesar 0.225, artinya apabila ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) meningkat sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan (Y) akan bertambah sebesar 0.225.

b. Koefisiensi Determinan

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap variabel kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel IV. 9 berikut ini.

Tabel IV.9
Hasil Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.590 ^a	.348	.343	2.640	1.485

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan (X3), Penerapan SAP (X1), Motivasi Kerja (X2)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Pengolahan data primer, 2019

Berdasarkan tabel IV.9 menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0.590 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari *output* tersebut diperoleh koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,343, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel-variabel bebas (penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan) adalah sebesar 34,3%, sedangkan sisanya 65,7% dipengaruhi oleh variabel yang lain.

c. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hasilnya pengujian hipotesis secara simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut ini :

Tabel IV.10

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100.632	3	33.544	13.558	.000 ^a
	Residual	882.612	41	21.527		
	Total	983.244	44			

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan (X3), Penerapan SAP (X1), Motivasi Kerja (X2)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS Versi.23.00

Berdasarkan tabel IV.10 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa hasil nilai F_{hitung} untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1), motivasi kerja (X_2), dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 13.558 dan nilai sig sebesar 0.000 sedangkan F_{tabel} untuk $dk = n - k - 1 = 45 - 3 - 1 = 41$ adalah 2,83. Hasil ini menunjukkan $F_{hitung} (13.558) > F_{tabel} (2,83)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, Artinya penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada perundang-undangan secara bersama-sama

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, secara simultan hipotesis terbukti.

d. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.11 berikut ini .

Tabel IV.11
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model			<i>Collinearity Statistics</i>	
	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.839	.000		
Penerapan SAP (X1)	3.176	.004	.895	1.117
Motivasi Kerja (X2)	3.679	.000	.887	1.128
Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (X3)	2.924	.012	.972	1.028

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Pengolahan data primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan Tabel IV.11 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X₁) sebesar 3,176 dan nilai t_{tabel} untuk $dk = n - 2 = 45 - 2 = 43$ adalah 1,68107. Hal ini berarti $t_{hitung} (3,176) > t_{tabel} (1,68107)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2) **Pengaruh Motivasi Kerja(X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Berdasarkan Tabel IV.11 juga diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel motivasi kerja (X_2) sebesar 3.679, hal ini berarti t_{hitung} (3.679) $>$ t_{tabel} ($1,68107$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, Motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3) **Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Berdasarkan Tabel IV.11 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan ketaatan pada peraturan perundang-undangan(X_3) sebesar 2,924 dan nilai t_{tabel} untuk $dk = n - 2 = 45 - 2 = 43$ adalah 1,68107. Hal ini berarti t_{hitung} ($2,924$) $>$ t_{tabel} ($1,68107$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis linear berganda, diketahui adanya pengaruh positif antara variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan persamaan regresi, yaitu $Y =$

$35.936 + 0.317 X_1 + 0.354 X_2 + 0.225 X_3 + e$. Hasil uji hipotesis secara simultan pada tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan nilai $F_{hitung}(13.558) > F_{tabel}(2,83)$, dengan tingkat sig F $0,000 < 0,5$ (signifikan), artinya penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil uji hipotesis secara parsial pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan nilai $t_{hitung}(3,176) > t_{tabel}(1,68107)$, dengan tingkat sig t $0,004 < 0,05$ (signifikan), artinya penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh kualitas laporan keuangan daerah, nilai $t_{hitung}(3,679) > t_{tabel}(1,68107)$, dengan tingkat sig t $0,000 < 0,5$ (signifikan), artinya motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan nilai $t_{hitung}(2,924) > t_{tabel}(1,68107)$, dengan tingkat sig t $0,012 < 0,5$ (signifikan), artinya ketaatan pada perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil ini diuraikan melalui uji koefisien determinasi yang menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan mampu mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan sebesar 34,3% sisanya 65,7% dipengaruhi variabel lain.

1. Perbandingan Hasil Teori

Suatu pemerintah yang menerapkan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintah. Dengan standar akuntansi pemerintah diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan. Opini laporan keuangan yang diberikan oleh BPK RI juga mempertimbangkan materialitas penyajian akun, antara komponen laporan keuangan dan keseluruhan informasi laporan keuangan. Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim serta temuannya dari tahun 2012-2016.

Penerapan standar akuntansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu dibutuhkan motivasi kerja yang baik untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

2. Perbandingan Hasil dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah positif dan

signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja, dan ketaatan pada perundang-undangan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Arif Ardi Kusumah (2012) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). Tujuan dalam penelitian ini untuk (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya (2) Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya (3) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD / OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Untuk menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (2) Untuk menguji Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap

Kualitas Laporan Keuangan. (3) Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2013) Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Susanto (2016) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris : 1. Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 2. Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 3.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 4. Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah hasil Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2014) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman SAP dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jembrana.

Penelitian yang dilakukan oleh Baja Lodhrakenjana dan Elvira Luthan (2013) Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pada Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen pegawai akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini masing-masing variable motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen pegawai akuntansi berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara bersama-sama dan signifikan ketiga variable ini

saling mendukung dan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Fahrul Razi (2017) Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 2) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 3) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 4) Untuk menganalisa secara empiris pengaruh kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini keempat variable ketaatan terhadap peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Arif Ardi Kusumah (2012), Sukmaningrum (2012), Sari (2014), Baja Lodhrakenjana dan Elvira Luthan (2013), dan Riska Fahrul Razi (2017).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah, motivasi kerja dan ketaatan pada perundang-undangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian seperti dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. Diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan dan pertimbangan pada pemerintah Kabupaten Muara Enim agar dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah, memberikan motivasi kerja dan

menaati peraturan perundang-undang dalam pengelolaan laporan keuangan daerah.

2. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena memiliki banyak keterbatasan diantaranya jumlah sampel yang digunakan tidak cukup mengeneralisasi pemerintah kabupaten Muara Enim dikarenakan kurangnya tingkat pengembalian responden.
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap instrumen pertanyaan, serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab pertanyaan dapat menjadi masalah subjektivitas dari responden sehingga penelitian ini rentan terhadap bias dari jawaban responden,
4. Peneliti selanjutnya memperluas jumlah sampel untuk dapat mengeneralisasi hasil penelitian yang terkait, dengan memperluas jumlah sampel untuk seluruh OPD yang ada di pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012-2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di Kota Palembang.
- Dhedy Triwardana. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar, Februari 2017).
- Goleman, Daniel. 2010. *Kecerdasan Emosional*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utami.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Heizer, Jay dan Barry Render. 2010. *Manajemen Operasi*. Edisi Ketujuh Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumah Arif Ardi. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya).
- Lodhrakenjana Baja dan Luthan Elvira. 2013. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Depok.
- Ningtyas. 2015. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Nurlaila. 2013. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang)

- Nuryaman Dan Veronica Christina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi Dan Bisnis*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Razi Riska Fahrul. 2017. Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sukmaningrum. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Sujarweni, V Waratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Sujarweni, V Waratna. 2015 *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Susanto Puji. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung.
- Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.

Sondang P. Siagian. 2012. *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*. Penerbit Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

www.bpk.go.id

Palembang.bpk.go.id